# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

##  Literatur Review

Untuk menganalisis peran Japan Foundation dalam memperkenalkan kebudayaan Jepang di Indonesia melalui program Nihongo Partners, penulis mencoba bersandar pada rujukan-rujukan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik ataupun tema yang sama dengan penelitian penulis.

Rujukan bahan pertama yang penulis gunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Nuraini dari Universitas Riau yang berjudul *Diplomasi Kebudayaan Jepang terhadap Indonesia dalam Mengembangkan Bahasa Jepang[[1]](#footnote-1).* Jurnal tersebut berisi mengenai diplomasi kebudayaan Jepang melalui bahasa, dengan melalui bahasa pemerintah Jepang meyakini adanya kesepahaman antara Jepang dengan Indonesia maupun negara lain dan akan menimbulkannya ketertarikan dengan negara Jepang secara menyeluruh sehingga akan lebih mudah bagi masyarakat internasional untuk memahami kebudayaan Jepang. Perkembangan yang ada di Indonesia termasuk budaya dan bahasa Jepang tidak lepas dari peranan the Japan Foundation sebagai lembaga resmi dari pemerintah Jepang.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan adalah terletak pada studi kasus programnya, dimana penulis menggunakan studi kasus program Nihongo Partners sedangkan di dalam jurnal tersebut membahas programnya secara umum. Disini dapat dilihat perbedaannya meskipun Japan Foundation memiliki peran yang sama yaitu sebagai lembaga resmi pemerintah Jepang dalam menyebarkan kebudayaan Jepang di Indonesia melalui bahasa Jepang tetapi tidak secara spesifik programnya seperti apa. Studi pustaka ini berkontribusi bagi penulis dalam melihat bagaimana perkembangan bahasa Jepang di Indonesia.

Tulisan kedua yang penulis jadikan referensi adalah sebuah skripsi yang berjudul *Diplomasi kebudayaan Jepang di Indonesia melalui The Japan Foundation Tahun 2003-2011* yang ditulis oleh Iyul Yanti.[[2]](#footnote-2) Tulisan ini menjelaskan mengenai diplomasi kebudayaan Jepang di Indonesia yang dimana melalui lembaga resmi pemerintah Jepang yaitu Japan Foundation sebagai sumber kebudayaan negara Jepang.

Pada studi kasus ini terdapat perbedaan yaitu yang dimana pada studi kasus tersebut diplomasi kebudayaan yang dilakukan Jepang dengan Indonesia melalui lembaganya yaitu Japan Foundation, sedangkan penulis menggunakan studi kasus Japan Foundation nya sebagai peranannya dalam memperkenalkan kebudayaan Jepang di Indonesia. Perbedaan lainnya yaitu pada program nya dalam tulisan ini tidak ada program nya melainkan spesifik membahas mengenai Japan Foundation nya secara keseluruhan dari tahun 2003-2011. Tulisan ini berkontribusi bagi penulis dalam mengetahui lebih dalam mengenai Japan Foundation sebagai sumber kebudayaan negara Jepang.

Rujukan bahan ketiga yang penulis gunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Happy Nugraha dari Universitas Mulawarman yang berjudul *Upaya The Japan Foundation dalam meningkatkan Hubungan Kerjasama Indonesia-Jepang di Bidang Budaya[[3]](#footnote-3).* Jurnal ini membahas mengenai kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang budaya yang diikuti oleh adanya upaya yang dilakukan Japan Foundation dalam menyebarkan budaya Jepang di Indonesia.

Dalam studi kasus ini terdapat perbedaan yaitu dalam jurnal ini lebih memfokuskan terhadap kerjasamanya antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang budaya dan terdapat upaya Japan Foundation dalam mendukung kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam bidang budaya, sedangkan penulis menggunakan studi kasus nya yaitu lebih kepada memperkenalkan budaya Jepang di Indonesia melalui program Nihongo Partners yang dimana program tersebut lebih membahas mengenai bahasa dan budaya Jepang. Tulisan ini berkontribusi bagi penulis karena untuk mengetahui uapaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Japan Foundation.

Rujukan bahan keempat yang penulis gunakan adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Irfan Hakim dari Universitas Komputer Indonesia yang berjudul *Peranan Japan Foundation dalam Menyebarluaskan Kebudayaan Jepang di Indonesia Tahun 2013-2015[[4]](#footnote-4).* Jurnal ini menjelaskan tentang peran Japan Foundation yang memiliki peranan yang cukup besar dalam memenuhi kepentingan nasional Jepang. Japan Foundation menjadi bagian penting juga bagi kesuksesan dalam mengimplementasikan diplomasi publik negaranya di Indonesia.

Perbedaan yang terlihat dalam jurnal ini yaitu menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia, sedangkan studi kasus yang penulis gunakan yaitu memperkenalkan kebudayaan Jepang dan mempunyai program secara spesifik yaitu program Nihongo Partners. Tulisan ini berkontribusi bagi penulis dalam mengetahui peranan Japan Foundation pada tahun 2013-2015.

##  Kerangka Teoritis

 Dalam penyusunan skripsi ini akan digunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu menganalisa dan memahami permasalahan yang di dukung oleh teori-teori dari para pakar dan para ahli yang dapat memberikan hasil yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

 Kerangka teoritis merupakan sumber dan landasan atau bahan acuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang akan diteliti. Berupa konsep teori dan pernyataan para pakar atau ortoritas tertentu yang memiliki wewenang serta pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang tengah dikaji sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam permasalahan yang tengah dikaji. Sehubungan dengan penelitian ini yang terkait dalam kerangka teoritis ini berhubungan dengan kerjasama atau negoisasi antar kedua negara.

 Secara khusus Hoffman menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis *terutama* memperhatikan hubungan politik antar negara. Adanya kata “terutama” dalam definisi arti sempit ini menunjukan bahwa di samping negara ada juga pelaku internasional, transnasional, atau supranasional yang lain seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), UE (Uni Eropa), MNC (*Multi National Corporation*), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGOs (*Inter-governmental Organizations*), INGOs (*Inter-Non-governmental Organizations*) dan sebagainya.

Pada dekade tahun 1980-an pola studi Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa. Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagi suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. *The Dictionary of World Politics* mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara.

*Mc.Clelland* mendefinisikan Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan –kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasioal. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.[[5]](#footnote-5)

Banyak definisi yang dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan studi Hubungan Internasional, yang dikemukakan oleh para ahli Hubungan Internasional, yaitu sebagi berikut:

Karen Mingst menyatakan bahwa hubungan internasional adalah studi yang mempelajari tentang interaksi diantara berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang mencakup negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintah lokal, dan para individu. (*international Relations is the studi of interactions among the various actors that participate in international politics, including states, international organizations, non govermental organizations, sub national entities like bureaucracies and local government, and individuals).* Steve Chan mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi antara aktor-aktor yang tindakan-tindakannya atau kondisi-kondisinya memiliki konskuensi akibat yang penting bagi pihak lain di luar yuridiksi efektif unit politik (negara) mereka. (*International relations as the interactions of those actors whose actions or conditions have important consequences for others outside the effective juridiction of their political unit).* Conway W. Henderson mengemukakan bahwa studi Hubungan internasional adalah studi mengenai siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana dalam hal diluar negaranya atau dalam hal melintasi garis-garis batas nasional. (*International relations is studi of who gets what, when, and how in matters external to states or in matters crossing national boundary lines).* George A. Lopez dan Michael S. Stohl mendefinisikan hubungan internasional sebagai suatu aktifitas manusia dimana para individu atau kelompok dari suatu bangsa/negara berinteraksi resmi atau tidak dengan para individu atau kelompok dari negara lain. (*International relations may be defined as a human activity in which individuals or groups from one nations interact, officially or unofficially, with individuals or groups from other nations).* Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan hubungan internasional adalah interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh para aktor dipanggung internasional, melintasi batas-batas kedaulatan negara. Oleh sebab itu, disiplin ilmu Hubungan Internasional merupakan disiplin yang interdispliner dan bidang studi yang dipelajarinya sangat beragam. Bidang-bidang yang dikaji nya menyangkut banyak hal, seperti: politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, organisasi internasional, diplomasi, analisa politik luar negeri, studi strategis, konflik dan perdamaian, dan ekonomi politik internasional.[[6]](#footnote-6)

Adapun politik internasional itu sendiri adalah interaksi mengenai kebijakan negara-negara dalam pola hubungan kekuasaan yang berubah. Menurut Hans Morgenthau, *International Relations is a struggle for power among nations* (hubungan internasional merupakan perjuangan untuk kekuasaan diantara bangsa-bangsa). Selain menekankan pada politik internasional, definisi hubungan internasional yang dapat diklasifikasikan “definisi sempit” adalah terlalu berorientasi pada negara (*state-centric oriented).* Dalam pandangan para sarjana HI yang menganut pendekatan ini, meskipun hubungan internasional juga berlangsung dalam isu-isu nonpolitik (seperti ekonomi, keamanan, hukum, kebudayaan, alih teknologi, dan sebagainya), namun pelaku (*actor)* hubungan internasional tetap negara. Keith Shimo mengatakan, dalam arti luas, studi HI mencakup keseluruhan yang kompleks mengenai hubungan-hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik, dan sosial dari semua negara, serta unsur-unsur populasi dan entitas mereka.[[7]](#footnote-7)

JOSEPH NYE menciptakan istilah "soft power" untuk menggambarkan suatu bangsa kemampuan untuk menarik dan membujuk. kekuatan lunak muncul dari ia menarik budaya, cita-cita politik, dan kebijakannya. Soft power adalah pokok dari demokrasi sehari-hari politik. Kemampuan untuk menetapkan preferensi cenderung dikaitkan dengan aset tidak berwujud seperti kepribadian yang menarik, budaya, politik nilai dan lembaga, dan kebijakan yang dipandang sah atau memiliki otoritas moral. Jika seorang pemimpin mewakili nilai-nilai yang diinginkan orang lain untuk mengikuti, akan lebih murah untuk memimpin. Soft power tidak hanya sama dengan pengaruh. Bagaimanapun, pengaruh juga dapat mengandalkan kekuatan ancaman atau pembayaran. Dan soft power lebih dari sekadar persuasi atau kemampuan untuk menggerakkan orang dengan argumen, meskipun itu adalah bagian penting dari itu. Itu juga kemampuan untuk menarik, dan ketertarikan sering menyebabkan persetujuan. Secara sederhana Secara umum, soft power adalah daya tarik. Istilah dari sumber daya, sumber daya lunak adalah aset yang menghasilkan daya tarik tersebut. Apakah aset tertentu adalah sumber soft power? menghasilkan daya tarik dapat diukur dengan meminta orang melalui jajak pendapat atau kelompok fokus.

Soft Power suatu negara terutama bersandar pada tiga sumber daya: budaya miliknya (di tempat-tempat yang menarik bagi orang lain), nilai-nilai politiknya (Ketika itu hidup sampai mereka di rumah dan di luar negeri), dan kebijakan luar negerinya (ketika mereka dilihat sebagai sah dan memiliki otoritas moral.) Mari kita mulai dengan budaya. Budaya adalah seperangkat nilai dan praktik yang menciptakan makna bagi masyarakat. Ia memiliki banyak manifestasi. Ini umum untuk membedakan antara budaya tinggi seperti sastra, seni, dan pendidikan, yang menarik bagi para elit, dan budaya populer, yang berfokus pada hiburan massal. Ketika budaya suatu negara memasukkan nilai-nilai universal dan kebijakannya mempromosikan nilai dan minat yang dibagikan orang lain, itu meningkatkan probabilitas memperoleh hasil yang diinginkan karena hubungan daya tarik dan tugas yang diciptakannya. Nilai sempit dan kultur parokial cenderung menghasilkan kekuatan lunak. Sejarawan Niall Ferguson menggambarkan Soft Power sebagai "*nontraditional forces such as cultural and commercial goods" and then dismisses it on the grounds "that it's, well, soft.”[[8]](#footnote-8)*

Soft power dipahami sebagai kemampuan untuk "mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan ”tanpa paksaan atau dorongan ekonomi. Mekanisme ini relatif mudah. Gagasan soft power Nye adalah sejenis kooptasi — di mana tujuan dicapai dengan membuat orang lain “menginginkan” apa yang Anda inginkan. ”Kekuatan lunak mencakup tiga kategori besar: (a) mempengaruhi, (b) kekuatan argumen aktor, dan, mungkin yang paling penting, (c) "daya tarik" budaya dan lembaga aktor — yang seharusnya "Aset tidak berwujud" yang menarik pelaku lain untuk menginginkan tujuan yang sama dan melihat pemandangan politik internasional dalam bingkai normatif.

Formulasi Nye menawarkan bahwa soft power adalah politik internasional oleh pihak lain berarti — ini menunjukkan bahwa tindakan persuasi dan komunikatif dapat menghasilkan politik berakhir, dan agar para pelaku internasional dapat memiliki atau mengolah sumber daya secara berurutan untuk menggunakan daya lunak. Nye juga mengklaim itu karena soft power mewakili sumber daya keduanya untuk mencapai tujuan dan perilaku yang terukur, seperti kebijakan diplomasi publik telah menjadi instrumen penting soft power. Dia menyatakan bahwa diplomasi publik menyediakan hubungan penting antara kedua aspek ini; ini “Instrumen yang digunakan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya ini dengan dengan berkomunikasi dan menarik publik dari negara lain. " [[9]](#footnote-9)

Dalam buku *kiat diplomasi*, Jusuf Badri seorang mantan diplomat yang pernah bekerja di beberapa negara asia, mengutip beberapa pengertian tentang diplomasi dari para pakar maupun dari kamus. Antara lain

Kamus *oxford advanced leaner’s dictionary of currentenglish:*

1. *Management of country’s affairs by its agents (ambassadors and ministers), and their direction by the ministry of foreign affairs at home; skill in this.* (pengelolaan urusan-urusan negara oleh wakil-wakilnya di luar negeri, paraduta besar dan duta, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan departemen luar negerinya; keterampilan dalam soal ini)
2. *Art of in dealing with people so that business is done smoothly.* (seni mengenai keterampilan dalam berurusan dengan orang sehingga bisnis yang dilakukan berjalan lancar)

Kamus Webber

1. *The art and practice of conducting negotiations between nations.* (seni dan praktik dalam melakukan perundingan antarbangsa.)
2. *The skill in handling affairs without hostility.* (keterampilan dalam mengelola serba urusan tanpa menimbulkan permusuhan)

Jusuf badri juga mengutip pendapat para pakar, antara lain:

Sir Ernest Satow dalam *“Guide to Diplomatic Pratice” (1957),*

1. *The application of fact and intelligence to the conduct of foreign relations betweem government of independent states.* (penerapan kemampuan keterampilan serta intelegensi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri antar pemerintah diantara negara-negara berdaulat).
2. *The conduct of business between states by peaceful means.* (penjalinan bisnis antara berbagai negara dengan cara-cara damai)

Selain itu Rivier (dalam Satow, 1957) yang juga dikutip oleh Jusuf Badri menyebutkan:

“*The use of ‘diplomacy; is three-fold:*

*1st. “The science and art of representing States and negotiating.*

*2nd. “The same word is used... to express a complex concept covering either the whole representation of a state, including the Ministry of Foreign Affairs, or, all political agents. It is in this sense that one talks of the merits of French diplomacy during certain eras, of russian diplomacy, Austrian diplomacy.*

*3rd. “finally, one understands by diplomacy, the career or profession of a diplomat. One takes path in diplomacy just as one takes oath for the magistrate, the bar, the army.” (Principles of the law of people)*

Pengertian diplomasi ada tiga jenis, yaitu:

1. Ilmu dan seni dalam mewakili negara dan bernegoisasi
2. Kata yang sama dipergunakan untuk mengekspresikan suatu konsep yang cukup kompleks serta upaya mewakili negara, termasuk Kementrian Luar Negeri, atau seluruh agen-agen politik. Dalam pengertian inilah, orang dapat menyebutkan tentang keandalan diplomasi perancis selama masa-masa tertentu, atau tentang diplomasi Rusia, diplomasi Austria
3. Akhirnya, diplomasi diartikan sebagai karier atau profesi seorang diplomat. Seorang yang mengangkat sumpah untuk menjadi pengacara, atau juga menjadi prajurit (prinsip-prinsip hak kewajiban rakyat).

Badri juga mengutip definisi kata ‘diplomasi’ dari pakar luar negeri lain sebagai berikut:

1. *Diplomacy is the art of getting others to do what we want under the impression that it is what they want themself.* (Diplomasi adalah seni menyuruh orang lain mengerjakan apa yang kita inginkan, tetapi yang bersangkutan justru merasakan, bahwa yang demikian itulah yang memang dia sendiri kehendaki.)
2. *Diplomacy is being an art of accomodation and persuasion* (diplomasi adalah seni akomodasi dan persuasi)
3. *Diplomacy is the art of handling people, of getting well with them.* (diplomasi adalh seni pengendalian manusia demi terjalinnya hubungan yang baik)

Terakhir, Badri menekankan definisi yang dikemukakan Kulski sebagai definisi yang cukup menggambarkan dengan baik tentang pengertian diplomasi.

“ *To strive for the achievement of national objectives by peaceful means i.e. by negotiations with other states”* (W.W. Kulski, *international Politics in A Revolutionary Age, 1967)* (berusaha mencapai tujuan-tujuan nasional dengan jalan damai, yaitu dengan melakukan perundingan-perundingan dengan negara-negara lain)[[10]](#footnote-10)

 Kebudayaan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat hubungan internasional. Itulah sebabnya sejak dahulu suatu kebudayaan diperkenalkan para diplomat kepada masyarakat internasional untuk memengaruhi atau memperbaiki sikap dan pandangan mereka terhadap negaranya. Indonesia pun memanfaatkan kebudayaan sebagai sarana diplomasi.

Dalam hubungan antarbangsa, menurut kartini, kebudayaan merupakan sarana penunjang yang ampuh bagi diplomasi dan dapat menumbuhkan saling pengertian, bahkan dapat menjembatani pandangan-pandangan yang berbeda. Diplomasi kebudayaan bisa dilancarkan dalam bentuk berbagai festival internasional mengenai kebudayaan, seperti misalnya festival musik angklung, kulintang, dan gamelan; festival tari dari berbagai daerah; pameran benda-benda tradisional bersejarah, barang-barang antik dari emas dan perak, serta perhiasan-perhiasan permata intan berlian keraton; pagelaran seni rupa; pertunjukan teater dan film; serta bazar makanan tradisional. Festival-festival semacam itu selalu menarik minat sebagian besar khalayak massa di negara akreditasi tempat diplomat bertugas. Melalui festival itu, terjadilah interaksi aktif antarmanusia dan antarbangsa, dan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menunjang kegiatan diplomasi.

 Diplomat yang terkenal gencar melakukan diplomasi melalui sarana kebudayaan adalah mantan menteri luar negeri Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja. Mochtar boleh disebut sebagai diplomat yang pertama kali yang mencanangkan diplomasi kebudayaan dalam melancarkan strategi komunikasi, khususnya diplomasi kebudayaan. Di damping untuk menarik lebih banyak wisatawan asing berkunjung ke Indonesia dan investor asing menanamkan modal ke Indonesia, diplomasi kebudayaan dikembangkan dalam program kampanye kebudayaan untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional.[[11]](#footnote-11)

Istilah diplomasi publik sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1965 oleh Dean Edmund Gullion dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts Unversity. Diplomasi publik diciptakan dengan penetapan pada Fletcher of the Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy, yang mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:

“Diplomasi publik berhadapan dengan pengaruh, sikap publik atas pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, yang meliputi hubungan internasional diluar diplomasi internasional; perkembangan opini publik di negara lain; interaksi dari kelompok swasta dan kepentingan di suatu negara terhadap negara lainnya; pemberitaan masalah-masalah luar negeri dan dampaknya terhadap kebijakan; komunikasi antara para diplomat dan koresponden asing dan proses dari cultural komunikasi; pusat dari itu semua adalah arus transnasional atas informasi dan ide-ide”

Adapun definisi mengenai publik diplomasi dari beberapa sumber yakni:

Menurut *Planning Group for Integration Of USIA*, diplomasi publik didefinisikan sebagai diplomasi publik dimaksudkan untuk menjalankan kepentingan nasional dari Amerika Serikat melalui pengertian, informasi, dan mempengaruhi pendengar di luar negeri.

Menurut *Department of State* AS, diplomasi publik didefinisikan sebagai suatu program yang disponsori pemerintah yang dimaksudkan untuk menginformasikan atau mempengaruhi opini publik di negara lain, dengan instrumen utamanya adalah publikasi, film, pertukaran kebudayaan, radio dan televisi.[[12]](#footnote-12)

Diplomasi public menurut Nancy Snow (2009) adalah sesuatu yang tidak terhindarkan yang berhubungan dengan kekuasaan, terutama yang bersifat soft power yang tidak langsung memengaruhi seperti budaya, nilai, dan ideologi.

Diplomasi publik juga sangat berhubungan dengan pembentukan citra suatu negara. Citra dapat dinyatakan secara singkat sebagai “gambaran dalam benak kita”, seperti dikemukakan Walter Lippmann dalam bukunya Publik Opinion (1994, terjemahan) Sudah tentu termasuk gambaran tentang keadaan suatu negara. Gambaran yang diterima sebagai kenyataan, sekalipun bukan kenyataan apa adanya.

Adalah suatu hal yang ideal apabila citra suatu negara yang dibangun oleh diplomasi publik dapat menumbuhkan kepercayaan negara lain tentang potensi dan prestasi negara yang bersangkutan sehingga dapat memberikan keuntungan kepada negara lain apabila melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Di samping sudah tentu mendatangkan keuntungan pula bagi negara yang bersangkutan.[[13]](#footnote-13)

Konsep diplomasi publik membawa dua implikasi. Pertama, publik sebagai objek, dalam artian publik di negara lain adalah objek atau tujuan dari diplomasi negara. Implikasi kedua adalah publik sebagai subjek, dalam artian publik di tataran domestik ikut serta dalam aktivitas diplomasi negara/pemerintah.

Dalam diplomasi publik, masyarakat, baik dalam konteks individu maupun kelompok dapat memberikan inisiatif kepada kebijakan pemerintah dan termasuk di dalamnya aktivitas yang seharusnya dapat membentuk opini publik di negara lain. Diplomasi publik juga semakin menurunkan derajat perbatasan antarnegara. Dalam komunikasi global, opini publik dapat secara efektif memengaruhi perilaku negara aktivitas dan pengaruh dari aktor non-negara juga meningkat, baik dalam konteks jumlah maupun jenisnya.

Kamus hubungan internasional menyebutkan bahwa diplomasi publik didefinisikan sebagai usaha sebuah negara untuk memengaruhi opini publik di negara lain dengan menggunakan beberapa instrumen, seperti film, pertukaran budaya, radio, dan televisi. Sedangkan Jan Mellison melihat diplomasi publik, seperti anggur lama dalam botol yang baru *(the old wine in the new bottle).* Diplomasi publik juga didefinisikan sebagai usaha sebuah negara untuk memengaruhi opini dari publik maupun pemimpin di negara lain dengan maksud untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Hal ini juga terkait dengan proses komunikasi dari pemerintah sebuah negara kepada publik di negara yang lain dengan mengirim pesan tentang pemikiran atau kebijakan negara tersebut. Untuk mengidentifikasi diplomasi publik, Humphrey Taylor juga membedakan diplomasi publik dengan diplomasi tradisional dalam sudut pandang lain. Diplomasi tradisional sering menggunakan “hard power” atau menggunakan militer dan ekonomi. Diplomasi publik menggunakan “soft power”, dangan menggunakan kebudayaan, pendidikan, kapabilitas militer maupun ekonomi. Tujuan utama dari diplomasi publik ini tidak hanya memunculkan atau membentuk sikap saling menghormati, namun juga menimbulkan ketertarikan.

Diplomasi publik melalui pertukaran budaya, budaya adalah unsur yang tepat untuk melakukan pendekatan antarnegara. Hal ini penting karena terlihat lebih aman untuk melakukan pendekatan budaya daripada ekonomi atau politik. Dengan alasan ini, maka kementrian mengadakan program budaya yang memfasilitasi orang asing dapat memperkenalkan budaya mereka ke Jepang dan sebaliknya, masyarakat Jepang dapat memperkenalkan budayanya diluarnegeri. Salah satu programnya yaitu bahasa Jepang, untuk membangun pemahaman tentang Jepang adalah melalui bahasa. Semakin banyak bahasa Jepang yang dipelajari oleh orang di negara lain, maka hal ini mempermudah pemahaman mereka tentang Jepang. Setiap tahun pelajar dari berbagai negara yang menyukai belajar bahasa Jepang meningkat. Alasan mereka untuk mempelajari bahasa Jepang tidak hanya untuk tujuan pendidikan, namun juga didukung oleh ketertarikan mereka terhadap budaya pop Jepang. Untuk program bahasa ini, MOFA (*Ministry of Foreign Affairs*) bekerja sama dengan Japan Foundation. sekarang, MOFA juga merancang JF Nihongo Network atau Sakura Network sebagai sebuah jaringan yang menghubungkan 100 lokasi di dunia ini yang menghubungkan para peminat studi bahasa Jepang dari seluruh dunia

MOFA dan Japan Foundation mengadakan beberapa program untuk memfasilitasi dan mengundang peneliti dan ilmuan dari negara lain untuk mempelajari politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya Jepang. Pemerintah juga membantu pengembangan pusat pembelajaran, seperti buku, dukungan terhadap perpustakaan dan lain-lain. Salah satu kegiatan lainnya adalah dengan meningkatkan pertukan, kontibusi, dan komunikasi antar intelektual antara Jepang dan negara lain. Program ini disebut juga sebagai program pertukaran intelektual.[[14]](#footnote-14)

Institusi lain yang juga memiliki hubungan dekat dengan diplomasi publik Jepang adalah Japan Foundation. Japan Foundaton adalah institusi pertama yang memfokuskan diri pada aktivitas kebudayaan. Institusi ini dibawah MOFA, terutama untuk program yang berkaitan dengan pertukaran budaya internasional. Japan Foundation telah didirikan untuk melakukan beberapa kegiatan yang sebenarnya berhubungan dengan diplomasi publik, yaitu kegiatan untuk menarik perhatian masyarakat dari negara lain untuk membangun keprcayaan dan citra positif tentang Jepang.[[15]](#footnote-15)

Kata "kebudayaan" itu berasal dari (bahasa Sanskerta) yakni "buddayah" yang merupakan suatu bentuk jamak dari kata "budhi" yang berarti ialah "budi atau akal". Kebudayaan tersebut diartikan ialah sebagai "hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau juga akal". Pengertian Kebudayaan dengan secara umum adalah suatu hasil cipta, rasa jugaa karsa manusia didalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup suatu pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan juga kebiasaan. Andreas Eppink menggemukakan bahwa, kebudayaan itu mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan dan juga keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain sebagainya, dan tambahan lagi segala pernyataan intelektual, serta juga artistik yang menjadi ciri khas dalam suatu masyarakat.

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan itu adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung suatu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta juga kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang ialah sebagai anggota masyarakat. Sedangkan dengan menurut definisi Koentjaraningrat yang menggemukakan bahwa pengertian kebudayaan adalah suatu keseluruhan manusia dari kelakuan serta hasil yang harus didapatkannya dengan belajar dan juga yang semua itu tersusun didalam kehidupan masyarakat.

Sama dengan Koentjaraningrat, didefinisikan juga oleh Selo Soemardjan serta Soelaeman Soenardi, dibukunya "Setangkai Bunga Sosiologi", merumuskan kebudayaan ialah sebagai semua hasil karya, cipta, serta juga rasa masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan juga kebudayaan kebendaan / kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk dapat menguasai alam sekitarnya supaya kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk semua keperluan masyarakat.[[16]](#footnote-16)

Bahasa sebagai sistem simbol untuk berkomunikasi akan benar-benar berfungsi apabila, pikiran, gagasan konsep yang diacu atau diungkapkan lewat kesatuan dan hubungan yang bervariasi dari sistem simbol itu dimiliki bersama oleh penutur dan penanggap tutur. Bahasa itu sendiri sebagai sistem yang kita warisi atau peroleh dari kebudayaan/masyarakat tempat kita tumbuh. Demikianlah bahasa itu sudah kuat melembaga; hingga individu itu ‘tidak’ bisa merubahnya. Sudah banyak teori yang mencoba menerangkan hubungan antara bahasa sebagai sistem simbol dengan fungsi-fungsi mental dan struktur kognitif daripada pemakainya. Teori-teori ini lazim disebut teori relativitas bahasa (linguistic relativity). Ada dua pendapat yang ekstrim dari teori ini yaitu:

* Bahwa operasi-operasi mental dijalankan bebas dari pengaruh bahasa; bahasa hanyalah sistem untuk mengungkapkan gagasan-gagasan
* Bahwa fungsi-fungsi mental sepenuhnya ditentukan oleh bahasa; bahasa sebagai gagasan-gagasan

Teori ini lazim disebut Whorfian Hyphothesis. Sudah barang tentu banyak teori yang mencoba menengahi kedua pendapat tadi seperti dari Carroll dan Hocket. Mereka mengemukakan bahwa *struktur bahasa tidak menentukan apa yang bisa/tidak bisa dipikirkan; tapi hanya membuat ungkapan beberapa gagasan lebih atau kurang sulit.*

Setiap kelompok mempunyai ciri pemerlain khusus (characteristic); walaupun satu sama lain ada kode linguistik yang bersamaan (common linguistic code). Setiap anggota masyarakat ujaran mempunyai kebersamaan dalam perangkat-perangkat budaya sperti politik dan etik, kebersamaan dalam mengklasifikasikan gejala-gejala itu serta makna yang diberikan terhadap klasifikasi ini. Masyarakat (ujaran) diikat kebersamaan dalam sejarahnya sendiri dan menyepakati sistem nilai budaya mereka. Mereka mengetahui cara yang baik dan salah dalam melakukan sesuatu seperti berpakaian, makan, minum, dan bagaimana mendidik anak-anak mereka. Dan mereka pun mempunyai cara tersendiri dalam mengkomunikasikan semua ini dengan perantaraan bahasa. Demikianlah hubungan kebudayaan dengan bahasa.[[17]](#footnote-17)

Dalam pertumbuhan kehidupan bangsa sekarang ini, sangatlah sulit untuk mengabaikan penguasaan bahasa asing. Bagaimanapun juga komunikasi antar bangsa mesti memegang peranan penting dalam pertumbuhan tersebut. Dan tentunya penguasaan bahasa asing tersebut merupakan jalan pintas supaya komunikasi itu bisa dengan efektif kita libati. Pengajaran apapun juga, termasuk bahasa asing ini, bagi Indonesia mesti didasarkan atau dimuarakan pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencetak manusia pancasila yang terampil dalam membangun. Dengan demikian fungsinya antara lain adalah

1. Untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi,
2. Untuk kepentingan komunikasi antarbangsa dalam rangka menjalin persahabatan dan perdamaian dunia.

Sewajarnyalah pengajaran bahasa asing itu akan memperlihatkan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Jika kita mengkaji buku UUD 1945, bab 15 pasal 36 dan fungsi-fungsi bahasa daerah sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, maka kedudukan dan fungsi bahasa asing ini menempati urutan ketiga setelah bahasa Indonesia dan daerah.

Kita pun menyadari bahwa bahasa Indonesia belum bisa dipergunakan sebagai alat komunikasi antarbangsa; dan bahwa bahasa inggris telah lama berfungsi sebagai bahasa internasional, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan dan politik, maka bahasa inggris dipilih sebagai bahasa asing pertama yang diajarkan di Indonesia. Ini pun sebagian dari politik bahasa atau perencanaan bahasa sebagaimana dikukuhkan dalam keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No . 096/1967 tanggal 12 desember 1967 yang menetapkan bahwa bahasa inggris adalah bahasa asing pertama.

Dan bahasa-bahasa asing lainnya seperti Arab, Perancis, Jepang, dan Cina ditinjau dari segi ini tidak sepenting bahasa inggris. Walau demikian dibukanya jurusan-jurusan bahasa asing lainnya pada perguruan tinggi atau dijadikan sebagai bahasa pilihan disekolah-sekolah menengah memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap bahasa-bahasa asing. Bidang –bidang seperti spionase, diplomatik, militer, pariwisata, perdagangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membutuhkan penguasaan bahasa-bahasa asing.[[18]](#footnote-18)

Ada empat kemungkinan yang menggambarkan hubungan antara bahasa dengan masyarakat, yaitu: (a). Struktur sosial akan mempengaruhi atau menentukan struktur perilaku linguistik; tingkatan usia, etnis, status sosial, jenis kelamin dan lain-lain, (b). Struktur linguistik akan mempengaruhi struktur sosial (misalnya, hipotesis Whorf dan pernyataan Bernstein), (c). Bahasa dan masyarakat akan saling mempengaruhi, (d). Tidak ada hubungan antara keduanya, seperti teori Chomsky yang asosial. Akan tetapi, analisa yang seperti ini lemah sifatnya dan banyak kritik yang diajukan oleh para linguis sendiri. Sebab itulah, hubungan antara bahasa dan faktor-faktor non linguistik amat kuat, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti: dialek, idiolek, ragam bahasa (situasi); formal, informal, lateral, umur, kelompok-kelompok penuturnya; geng, register dan lainlain.

Untuk memahami kebudayaan, Koentjaraningrat menggunakan sesuatu yang disebut “kerangka kebudayaan”, yang memiliki dua aspek tolak, yaitu wujud kebudayaan dan isi kebudayaan. Wujud kebudayaan berupa gagasan (sistem budaya) yang bersifat abstrak, perilaku (sistem sosial) bersifat konkret, dan fisik/benda (kebudayaan fisik) bersifat amat konkret. Sedangkan, isi kebudayaan terdiri dari tujuh unsur yang bersifat universal yaitu: bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi dan kesenian.

Sapir mengatakan adanya hubungan yang erat antara bahasa dengan kebudayaan serta menekankan bahwa bahasa dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga seseorang tidak dapat memahami yang satu tanpa mengetahui yang lain. Whorf, murid Sapir, memperluas ide tersebut. Dia bukan hanya mengatakan adanya suatu pengaruh, melainkan hubungan antara bahasa dengan kebudayaan merupakan suatu yang determinatif. Penutur bahasa yang berbeda-beda, menurut Whorf, akan memandang dunia secara berbeda sepanjang bahasa yang mereka pergunakan berbeda secara struktural.[[19]](#footnote-19)

Adapun pengertian peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan berarti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Mochtar Mas’oed menyatakan bahwa peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Perilaku yang diletakan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.[[20]](#footnote-20)

Jepang Sama seperti di Indonesia, walaupun Jepang terlihat hanya satu pulau, tetapi mereka hampir mirip dengan Indonesia, yang notabene nya memiliki banyak pulau, tetapi Jepang memiliki kesenian dan kebudayaan yang menarik, Meskipun Jepang merupakan negara yang terbilang sangat maju, tetapi Jepang tidak melupakan kesenian dan kebudayaan mereka yang turun temurun dari nenek moyangnya. Berikut ini merupakan beberapa kebudayaan dari Jepang yang sudah ada sejak jaman negara Jepang berdiri: Jepang memiliki pakaian Tradisional yang disebut Kimono, sudah banyak orang tau bahwa kimono adalah pakaian Tradisional Jepang. Upacara minum teh atau yang dikenla dengan Chad atau Sad, Adalah upacara yang mencerminkan kepribadian dan pengetahuan tuan rumah. Permainan Kendo adalah olah raga bermain pedang bambu sedangkan Judo adalah nama dari olahraga bela diri dari Jepang. Festival Matsuri Jepang adalah suatu festival budaya rakyat yang umumnya berkaitan dengan festival di kuil baik kuil Shinto (Jinja) maupun kuil Buddha (Tera) yang kebanyakan diselenggaran pada musim panas. Seni Teater Kabuki merupakan salah satu kebudayaan Jepang yang termasuk jenis seni teater karena memiliki unsur cerita yang dipadukan dengan seni tari dan musik. Para pemain mengenakan kostum mencolok dan sangat mewah. Make-up-nya terbilang dramatis untuk menonjolkan sifat dan karakter tokoh.[[21]](#footnote-21) Dan masih banyak lagi kebudayaan Jepang dari yang tradisional sampai yang modern. Saat ini banyak budaya Jepang digemari oleh masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini Japan Foundation memiliki peran dalam memperkenalkan sekaligus mempromosikan kebudayaan Jepang di Indonesia. masuknya kebudayaan Jepang di Indonesia melalui pendekatan soft power yaitu sebagai diplomasi publik Jepang terhadap Indonesia telah banyak mendapatkan respon positif bagi masyarakat Indonesia yang menyukai budaya Jepang seperti melalui industri budaya pop Jepang, budaya pop Jepang terhubung dengan sejarah dan tradisi Jepang. Sebagai contohnya seperti manga, manga sendiri bukan lah sesuatu yang baru tetapi memang merupakan tradisi Jepang mengenal seni bercerita melalui gambar sejak jaman dahulu. Kemudian dari manga sendiri bisa diadaptasi menjadi anime. Di Indonesia sendiri cukup banyak masyarakat yang menggemari manga maupun anime mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pun menyukainya. Dengan begitu tandanya diplomasi publik yang dilakukan oleh Jepang berhasil dilakukan di Indonesia demi mencapai kepentingan nasionalnya.

Begitu pun dengan Japan Foundation yang membuat salah satu program Nihongo Partners melalui program tersebut adanya interaksi antara kedua negara tersebut untuk saling memahami, membangun kepercayaan satu sama lain kedua negara tersebut. Japan Foundation mengimplementasikan program Nihongo Partners sebagai alat pertukaran kebudayaan, yang dimana native speaker dari Jepang sendiri akan memberikan sekaligus mengajarkan mengenai bahasa Jepang maupun kebudayaan negara Jepang kepada para pelajar, masyarakat di Indonesia. Begitu pula sebaliknya setelah native speaker mengikuti program Nihongo Partners dan kembali ke negara Jepang maka mereka pun akan membagi pengalamannya dengan masyarakat Jepang tentang negara Indonesia.

Program Nihongo Partners ini sangat memiliki pengaruh bagi negara Indonesia maupun negara Jepang karena telah banyak mendapatkan respon positif bagi masyarakat di Indonesia maupun para volunteers yang mengikuti program tersebut. Program ini cukup bagus untuk dijadikan alat pertukaran budaya maupun bahasa, bahasa Jepang memang banyak digemari masyarakat Indonesia begitu pula bahasa Jepang masuk ke dalam mata pelajaran bahasa asing yang wajib dipelajari di SMA/SMK.

Dari uraian pemikiran diatas, maka dapat ditarik beberapa asumsi yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan dikaji penulis adalah sebagai berikut:

1. Kebudayaan Jepang telah berhasil mempengaruhi masyarakat di Indonesia terutama melaui budaya pop Jepang dan bahasa.
2. Japan Foundation dalam membuat Program Nihongo Partners banyak mendapat respon positif
3. Program Nihongo Partners sebagai alat pertukaran kebudayaan antara kedua negara

##  Hipotesis

Berdasarkan indentifikasi masalah, perumusan masalah, dan kerangka teoritis atau pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti membangun hipotesis sebagai berikut:

“Melalui Japan Foundation dalam Program Nihongo Partners memperkenalkan Budaya dan Bahasa, menjadikan Pemahaman kebudayaan Jepang di Indonesia semakin meningkat yang ditandai dengan banyaknya Lembaga Pendididkan Bahasa Jepang di Indonesia”

##  Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Untuk lebih memahami dan memperjelas pemikiran atas hipotesis yang penulis paparkan di atas, maka operasionalisasi variabel dituangkan ke dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1. Operasionalisasi variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** **(Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**Japan Foundation dalam mengimplementasikan Program Nihongo Partners | 1. Perkembangan program Nihongo Partners
2. Peran Native Speaker Jepang dalam Program Nihongo Partners
3. Pengaruh program Nihongo Partners
 | 1. Pada tahun 2014 (gelombang 1 dan 2) telah dikirim 48 orang, dan pada tahun 2015 (gelombang 3 dan 4) dikirim 74 orang Nihongo Partner untuk Indonesia. ([https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/10/-kemendikbud-dan-japan-foundation-kirim-49-guru-ke-Jepang-4758-4758-4758](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/10/-kemendikbud-dan-japan-foundation-kirim-49-guru-ke-jepang-4758-4758-4758))
2. Data (Fakta) Peran Native Speaker Jepang dalam Program Nihongo Partners

(Kayoko Hashimoto (2018). Japanese Language and Soft Power in Asia. (Chapter 7): Kaoru Kadowaki. eBook.)1. Data (Fakta) pengaruh program Nihongo Partners (Kayoko Hashimoto (2018). Japanese Language and Soft Power in Asia. (Chapter 7): Kaoru Kadowaki. eBook.)
 |
| **Variabel Terikat:**Pemahaman kebudayaan Jepang di Indonesia semakin Menigkat | 1. Budaya Populer Jepang di Indonesia
2. Pendidikan Bahasa Jepang di Indonesia semakin Meningkat
3. Dampak Budaya Jepang di Indonesia
 | 1. Data (Fakta) Budaya populer Jepang atau selanjutnya disingkat J-pop umumnya meliputi pertunjukan televisi, Film, comic/manga, anime, musik, dan fashion. (Antar Venus & Lucky Helmi, Budaya Populer Jepang di Indonesia :

Catatan Studi Fenomenologis Tentang KonsepDiri Anggota Cosplay Party Bandung, VOLUME 1, NOMOR 1)1. Data (Fakta) Lebih dari 800.000 orang Indonesia sedang belajar bahasa Jepang. Maraknya orang Indonesia belajar bahasa Jepang seiring dengan populernya pop-culture Jepang, anime, manga, dan kuliner Jepang. (http://kbr.id/07-2013/survei\_\_makin\_banyak\_orang\_Indonesia\_belajar\_bahasa\_Jepang/9677)
2. Data (Fakta) Jepang telah menyebarkan pengaruh budayanya ke seluruh dunia terutama melalui produk-produk budaya populer. Anime (kartun Jepang) dan manga (komik Jepang) untuk menyebarkan budayanya. (https://www.kompasiana.com/mardhanaksatrya/55008ca7a33311926f5116d4/hegemoni-budaya-Jepang-melalui-anime-dan-manga#)
 |

##  Skema Kerangka Teoritis

PERAN JAPAN FOUNDATION DALAM MEMPERKENALKAN KEBUDAYAAN JEPANG DI INDONESIA MELALUI PROGRAM NIHONGO PARTNERS

**Gambar 2.1. Skema Kerangka Teoritis**

Indonesia

Japan Foundation

Studi Jepang & Pertukaran Intelektual

Pendidikan Bahasa Jepang di Luar Negeri

Pertukaran Seni & Budaya

Memperkenalkan Budaya Jepang melalui Bahasa Jepang

Pengaruh Budaya Jepang di Indonesia

Program Nihongo Partners:

* Mendatangkan Native Speaker Jepang
* Mendampingi Guru Bahasa Jepang di Indonesia
* Adanya Pertukaran Kebudayaan
1. Nuraini, Op.cit [↑](#footnote-ref-1)
2. Iyul Yanti, *Diplomasi kebudayaan Jepang di Indonesia melalui The Japan Foundation Tahun 2003-2011,* Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2012. [↑](#footnote-ref-2)
3. Happy Nugraha,Op.cit [↑](#footnote-ref-3)
4. Irfan Hakim*,* Op.cit [↑](#footnote-ref-4)
5. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 3-4 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ambarwati & Subarno Wijatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,* (Malang, Jatim: Intrans Publishing, 2016) hlm 5-8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dr. Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional,* (Depok: KENCANA, 2017) hlm 2-3. [↑](#footnote-ref-7)
8. Joseph S. Nye. Jr*. Soft Power The Means to Succes in World Politics.* 2004. eBook. hal 29. [↑](#footnote-ref-8)
9. Craig Hayden. *The Rhetoric of Soft Power Public Diplomacy in Global Contexts*. 2012. eBook. Hal 10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Zainal Abidin Partao M.M. Teknik lobi dan Diplomasi (Untuk Insan Public Relation). (PT INDEX 2006). Hal 31. [↑](#footnote-ref-10)
11. Drs. Mohammad Shoelhi, M.B.A., M.M. *Diplomasi praktik komunikasi internasional.* (Bandung: simbiosa rekatama media, Februari 2011), hal 81-82. [↑](#footnote-ref-11)
12. Apa yang dimaksud diplomasi publik dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-diplomasi-publik/10373/2> (diakses tanggal 21 desember) [↑](#footnote-ref-12)
13. Asep Saefudin Ma’mun *Diplomasi publik dalam membangun citra negara* dalam <https://www.esaunggul.ac.id/diplomasi-publik-dalam-membangun-citra-negara/> diakses tanggal 21 desember 2018 [↑](#footnote-ref-13)
14. Tonny Dian Effendy. *Diplomasi Publik Indonesia Perkembangan dan Tantangan.* (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, desember 2011). Hal 31-32. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, hlm 36 & 96. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pendidikanku net, *Pengertian Kebudayaan Dan Penjelasanya Terlengkap* dalam <https://www.pendidikanku.org/2015/03/pengertian-kebudayaan-dan-penjelasanya.html> diakses tanggal (21 desember 2018) [↑](#footnote-ref-16)
17. A. Chaedar Alwasilah. *Pengantar Sosiologi Bahasa.* (Penerbit Angkasa Bandung, 1993). Hal 70-71 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid.hal 145-146 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ahmad Mujib*, hubungan bahasa dan kebudayaan (Perspektif Sosiolinguistik*) Vol. 8, No. 1, Juni 2009 [↑](#footnote-ref-19)
20. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad, *Op.Cit,* hlm 30. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Kesenian dan Kebudayaan Negeri Jepang* dalam [https://www.artforia.com/kesenian-dan-kebudayaan-negeri-Jepang/](https://www.artforia.com/kesenian-dan-kebudayaan-negeri-jepang/) diakses pada tanggal 21 15 februari 2019. [↑](#footnote-ref-21)